
RESPON ECONOMIC COMMUNITY WEST AFRICAN STATES (ECOWAS) TERHADAP KUDETA MILITER DI GUINEA TAHUN 2021

Tiara Fitriyananda Prayoga¹, Frentika Wahyu Retnowatik²

***Abstract:** This research explains ECOWAS's response to the military coup that occurred in Guinea in 2021. Using the theory of international organizations, ECOWAS, as an international organization, has the authority to respond to the coup in Guinea. International organizations can play a crucial role in addressing various types of conflicts, both internal and international. This research employs a descriptive research method, utilizing primary data sources through literature studies and qualitative data analysis techniques. ECOWAS's responses include suspending Guinea's membership, imposing sanctions on the military junta, and sending envoys to address the Guinea crisis. The findings indicate that, although ECOWAS's responses and sanctions against the coup in Guinea in 2021 did not completely resolve the conflict, they helped de-escalate tensions and exert pressure on the military junta.*

***Keywords:** ECOWAS, Ethnic Conflict, Guinea, Military Coup*

Pendahuluan

Lepas dari jajahan Prancis, Guinea merupakan negara pertama yang meng-klaim kemerdekaan negaranya. Guinea yang ber-ibu kota Conakry ini terbagi menjadi empat wilayah geografis: Guinea Bawah, Fouta Djallon, Guinea Atas, dan Kawasan Hutan, atau Dataran Tinggi Guinea, Guinea Bawah; mencakup pesisir dan dataran pesisir (Britannica, 2023).

Guinea memiliki sumber daya alam berlimpah termasuk penghasil bauksit terbesar di dunia dan juga lebih dari 4 miliar ton bijih besi bermutu tinggi yang belum dimanfaatkan, cadangan emas dan berlian yang signifikan, jumlah uranium yang belum dapat ditentukan, serta cadangan minyak yang prospektif (International Monetary, 2021).

Guinea mendeklarasikan kemerdekaan pada 2 Oktober 1958, dua tahun lebih awal dari negara-negara yang berbahasa Prancis lainnya di Afrika. Prancis adalah satu-satunya negara di Eropa yang memiliki hubungan erat karena ketergantungan sumber daya alam yang ada di Afrika. Selain mengambil sumber daya alam yang ada di negara jajahannya, Prancis juga menyebarkan kebudayaannya yang dianggap lebih tinggi dari kebudayaan negara yang dijajahnya. (Kurniawati, 2010).

Secara keseluruhan, meskipun Guinea telah merdeka selama beberapa tahun, negara ini masih dengan masalah serius seperti kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Namun, harapan untuk pemulihan demokrasi tetap ada karena adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk warga negara, pemimpin agama, dan mahasiswa, yang secara konsisten

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : tiarafitriyanandaa@gmail.com.

² Staf Pengajar pada Prodi Hubungan Internasional, FISIPOL, UNMUL, Email: frentika.retnowatik@fisip.unmul.ac.id

mendesak pemulihan tata pemerintahan yang baik dan demokrasi elektoral. Meski sebagian besar aksi perlawanan dilakukan secara damai, pemerintah militer maupun sipil yang berkuasa sering kali merespons dengan tindakan represif, seperti penyiksaan, penculikan, dan kekerasan terhadap para aktivis. (ICNC, 2010).

ECOWAS merupakan organisasi regional penting di Afrika Barat yang memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Meskipun awalnya dibentuk untuk tujuan integrasi ekonomi, ECOWAS telah berkembang menjadi organisasi yang aktif dalam penyelesaian konflik di negara-negara anggotanya. Keterlibatan ECOWAS dalam konflik kudeta militer di Guinea pada September 2021 yang menggulingkan Presiden Alpha Conde, merupakan bagian dari rangkaian kudeta yang terjadi di Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai organisasi yang memiliki perjanjian *Protocol Relating to the Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace-keeping, and Security* dalam pasal 3 poin pertama yang berisi; “mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik internal dan antar negara”, memungkinkan untuk ECOWAS dapat memberi tindakan dan dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi pada negara anggotanya secara legal. Hal ini yang menarik peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya ECOWAS terhadap kudeta militer yang terjadi di Guinea pada tahun 2021.

Kerangka Teori

Tulisan ini menggunakan teori organisasi internasional untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Organisasi internasional merupakan struktur yang dibentuk oleh beberapa negara dan pemerintahan yang bekerja sama dalam berbagai bidang untuk menghasilkan manfaat bagi satu sama lain guna mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional dinilai mampu secara tidak langsung mempengaruhi perilaku suatu negara. Selain sebagai wadah untuk menciptakan kerjasama antar negara anggota, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk memecahkan permasalahan yang timbul antar negara anggotanya.

Teori Organisasi Internasional

Dalam menyelesaikan konflik diperlukan tindakan agar konflik menjadi reda bahkan damai. Dalam hubungan internasional, organisasi internasional merupakan aktor penting dalam struktur internasional. Organisasi internasional telah memainkan peran penting dan diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi negara. Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Clive Archer 1983:35).

Organisasi internasional dinilai mampu secara tidak langsung mempengaruhi perilaku suatu negara. Selain sebagai wadah untuk menciptakan kerjasama antar negara anggota, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk memecahkan permasalahan yang timbul antar negara anggotanya. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, terkadang organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam

negerinya ataupun masalah dalam negeri negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama-sama.

3. Sebagai aktor independen. Dapat membuat keputusan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan dari luar organisasi.

Organisasi internasional juga dibedakan menjadi 3 yakni:

1. *Intergovernmental organization* (IGO) Organisasi ini mudah diidentifikasi karena tujuan, struktur dan prosedur pembuatan keputusan yang jelas tertuang dalam perjanjian ataupun piagam. IGO memiliki anggota yang terbatas dan dapat digolongkan berdasarkan tujuannya. IGO memiliki status hukum dibawah hukum internasional.
2. *International non-governmental organization* (INGO) INGO adalah sebuah organisasi non-profit yang terlibat dalam aktivitas internasional. Organisasi jenis ini bisa berorientasi hanya pada satu isu atau memiliki banyak tujuan dalam agendanya. INGO berpartisipasi dengan cara 7 menentukan tujuan, menyediakan informasi, dan memberikan pendapat dalam forum politik internasional. Organisasi ini juga mendapat bantuan dana yang diperoleh dari pemerintah sehingga dalam kegiatannya INGO dapat bekerja sendiri maupun bersama dengan IGO.
3. *Multinational Corporation* (MNC) *Multinational corporation* merupakan firma berorientasi keuntungan dan berkaitan dengan aktivitas produksi meliputi laju barang dan jasa melewati batas nasional.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Metode

Tulisan ini merupakan penelitian eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon dari ECOWAS terhadap kudeta militer yang terjadi di Guinea pada tahun 2021. Jenis data primer berupa *Treaty of ECOWAS*. Sementara sumber data sekunder berupa literatur-literatur dari artikel online, dengan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan berbagai literatur. Dan teknik analisis data berupa kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Alpha Conde yang merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilu ini, mengumumkan rencana untuk merancang konstitusi baru yang memungkinkan Conde untuk mencalonkan diri ketiga kalinya dalam pemilihan mendatang. ECOWAS turut memberikan respon terhadap kudeta militer yang terjadi, karena Guinea yang merupakan salah satu negara anggota dari ECOWAS

Economic Community West African States (ECOWAS) adalah organisasi regional beranggotakan 15 orang, yang didirikan pada 28 Mei tahun 1975 melalui perjanjian Lagos, dengan mandat untuk mendorong integrasi ekonomi dan pembangunan bersama di semua bidang kegiatan negara-negara yang membentuknya. Negara-negara anggota yang membentuk ECOWAS adalah Benin, Burkina Faso,

Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal dan Togo. (ECOWAS int, 2011)

Sebelum terbentuknya ECOWAS, wilayah Afrika Barat terdiri dari sekelompok negara dengan sistem administrasi dan kolonial yang berbeda. Terdapat lima belas negara bagian dalam wilayah ini, yang menggunakan tiga bahasa asing resmi yang berbeda (Inggris, Perancis, dan Portugis). Keanekaragaman budaya, bahasa, dan ekologi di wilayah ini menciptakan peluang dan tantangan bagi proses integrasi. Upaya untuk menggabungkan kekuatan politik dan ekonomi selalu diakui sebagai langkah menuju penciptaan kesejahteraan bersama di kawasan ini (ECOWAS, 2022).

Pada tahun 1975, Perjanjian Lagos menjadi landasan pembentukan ECOWAS. Awalnya, ECOWAS dimulai dengan mempromosikan penciptaan adat istiadat dan serikat pekerja untuk memfasilitasi pergerakan bebas orang dan barang. Oleh karena itu, ini mencerminkan integrasi perdagangan dan sosial di antara negara-negara anggota yang menjadi landasan bagi berdirinya ECOWAS. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah kampanye peningkatan kesadaran telah diluncurkan bagi masyarakat dan pemerintah (Tsigbe; Kpaye, 2017). Perjanjian Lagos tahun 1975 awalnya bersifat murni ekonomis dan oleh karena itu tidak memuat komponen-komponen yang berkaitan dengan masalah perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pemerintahan. Namun, pada tahun 1993, Perjanjian ECOWAS direvisi untuk menyertakan perjanjian regional yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian, stabilitas, dan keamanan melalui promosi dan penguatan nilai-nilai keramah-tamahan.

Pada bulan Desember 1999, ECOWAS mengadopsi Protokol Terkait Mekanisme Pencegahan Konflik, Penatalaksanaan, Penyelesaian, Pemeliharaan Perdamaian, dan Keamanan, yang merupakan protokol komprehensif terkait perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Protokol ini bertujuan untuk mengatasi pemeliharaan perdamaian, dukungan kemanusiaan, kemampuan membangun perdamaian, dan isu salib kejahatan perbatasan. Selain itu, negara-negara anggota ECOWAS juga mengadopsi Protokol Tambahan mengenai Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik pada tahun 2001 sebagai instrumen untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Afrika Barat (Uneca, 2010). Sejak pendiriannya hingga saat ini, ECOWAS telah berkembang menjadi sebuah organisasi regional yang sah, yang muncul sebagai komunitas yang memiliki legitimasi, kekuatan ekonomi, dan kehadiran politik di Afrika Barat.

Konflik di Guinea

Kebanyakan kudeta yang terjadi dilakukan oleh militer. Militer dibentuk untuk melindungi negara di ancaman yang berasal dari luar negara, dan untuk menjalankan tugas tersebut militer diperkuat dengan senjatanya. Namun, semakin kuatnya militer dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan sipil. Meskipun sebagian besar negara menerapkan langkah-langkah hukum dan administratif untuk memastikan militer tunduk pada pemerintah sipil.

Pada tahun 2010, harapan untuk pembaharuan demokrasi di Guinea muncul kembali setelah beberapa tahun, diperintah oleh kediktatoran. Alpha Condé menjadi presiden pertama Guinea yang terpilih secara demokratis. Ia membangun reputasi sebagai pemimpin yang mempromosikan pidato-pidato pan-Afrika yang berapi-api dan mengkritik rezim otoriter di benua tersebut. Dengan latar belakangnya sebagai seorang profesor hukum, Ia diharapkan menjadi pelopor dari era baru demokrasi dan kemakmuran di Guinea. Namun, kinerja kepresidenan Condé di Guinea ternyata tidak sesuai harapan. (NKAFU, 2022)

Pada tahun 2020, Alpha Conde memenangkan pemilu dengan perolehan sebesar 59,5%. Pemilu tersebut merupakan pemilihan untuk masa jabatan ketiga Conde sebagai presiden di Guinea. Adapun kandidat dari pemilihan ini yaitu Alpha Conde dan Cellou Dalein Diallo. Alpha Conde sebagai pemimpin dari partai *Rally of the Guinean People (RDG)* dan Cellou Dalein Diallo yang memimpin partai oposisi utama *Union of Democratic Forces of Guinea (UFDG)*. Pemilu ini dianggap kontroversial karena Conde sebelumnya telah mengubah konstitusi untuk memungkinkan dirinya mencalonkan kembali melampaui batas dua periode yang sebelumnya berlaku. Meskipun pemilu ini juga ditentang oleh pihak oposisi yang menuduh adanya kecurangan, kurang dari setahun setelah pemilu ini tepatnya pada September 2021 terjadi kudeta militer yang menggulingkan Conde sebagai presiden di Guinea.

Amandemen konstitusi tersebut diketahui didorong oleh partai politiknya sendiri yakni *Rassemblement du peuple de Guinée* (Majelis Rakyat Guinea) yang berkuasa saat itu (Europarl, 2021). Dalam amandemen konstitusi yang disahkan pada tahun 2020 tersebut, meraih 90% suara dalam referendum nasional yang diboikot oleh oposisi dan diadakan tanpa pengamat internasional.

Hal ini kemudian memicu unjuk rasa dan protes terhadap referendum yang terjadi di Conakry dan kota-kota lain termasuk Labé, Mamou, Boké dan Nzérékoré. Kemenangan Alpha Condé dalam pemilihan umum tahun 2020 memunculkan protes dan represi kekerasan hingga beberapa puluh orang terbunuh dan lainnya dipenjara. Unjuk rasa dan protes tersebut tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Guinea. Tidak adanya pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Guinea ketika Alpha Condé menjabat sebagai presiden, diperburuk dengan adanya demonstrasi besar-besaran, menjadikan Guinea sebagai negara termiskin di wilayah Afrika dalam rentang waktu 2019-2020.

Selama menjabat menjadi presiden, Alpha Condé menggunakan sumber daya alam Guinea untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut. Namun, saat terjadi resesi ekonomi dan juga dalam upaya menyeimbangkan anggaran dan perekonomian negara, pemerintah Guinea dibawah kepemimpinan Alpha Condé pada Agustus 2021 mengumumkan kenaikan pajak, memangkas pengeluaran untuk polisi dan militer, dan meningkatkan pendanaan untuk jabatan presiden dan Majelis Nasional. Alpha Condé semakin dipandang sebagai penguasa yang otoriter hingga memunculkan ketidakpuasan rakyat Guinea atas meluasnya kemiskinan yang terjadi, banyaknya skandal korupsi, serta kenaikan pajak dan harga minyak.

Masalah penting di Guinea adalah terlalu banyaknya konsentrasi kekuasaan di kursi kepresidenan dibandingkan dengan lemahnya lembaga pemerintahan lainnya dan kurangnya kekuasaan otonomi di Majelis Nasional Guinea yang masih muda dan baru berjalan tiga tahun memberikan kontribusi yang besar terhadap ketidakseimbangan kekuasaan pemerintah ini. Ketegangan politik dan konflik-konflik yang terjadi setelahnya seringkali disebabkan oleh cara orang-orang yang berkuasa menjalankan urusan pemerintahan. Mereka memperlakukan rekan se-negaranya yang mungkin berbeda keyakinan politik, etnis, atau agama yang sama. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengucilkan, menindas, dan merampas hak kemanusiaan dan politik sejumlah orang. Peradilan yang tidak lengkap dan kurang independen menjadikan lembaga ini sebagai cabang pemerintahan yang lemah serta keterlambatan pemerintah dalam

menyelenggarakan pemilu bagi lembaga akar rumput menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Serangkaian peristiwa yang terjadi di Guinea dimana kehadiran Alpha Conde sebagai presiden telah membawa konsekuensi negatif terhadap demokrasi. (NKAFU, 2022)

Negara ini terakhir menggelar pemilihan presiden pada Oktober 2020, dimana Presiden Alpha Conde terpilih untuk masa jabatan ketiga yang kontroversial. Setelah pengambilalihan kekuasaan tersebut, pemerintah militer membentuk Dewan Nasional untuk Reunifikasi dan Pembangunan sebagai badan penguasa. Pada bulan yang sama, Dewan Nasional untuk Reunifikasi dan Pembangunan mengeluarkan Piagam Transisi untuk mengembalikan negara ke pemerintahan sipil, dan pada bulan Oktober 2021, Kolonel Doumbouya dilantik sebagai presiden sementara.

Pemerintahan militer membubarkan parlemen pada September 2021, dan pada 22 Januari, digantikan oleh Dewan Transisi Nasional yang terdiri dari 81 anggota tanpa melalui proses pemilihan. Pada tanggal 21 Oktober, pemerintah Guinea dan organisasi regional untuk Afrika Barat, yaitu Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, sepakat untuk periode transisi selama 24 bulan yang meliputi pemilihan lokal, legislatif, dan presiden setelah konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pada tanggal 7 Desember, para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat mengumumkan kesepakatan dengan pemerintah bahwa periode 24 bulan dimulai pada tanggal 4 Desember. (State Gov, 2022)

Tidak hanya Alpha Conde, presiden Guinea dari awal negara terbentuk sudah menciptakan pemerintahan yang otoriter. Pada tahun 1958, Guinea meraih kemerdekaan dari Perancis. Sekou Toure terpilih sebagai presiden pertama Guinea pasca-kemerdekaan, mendirikan rezim diktator yang berkuasa hingga kematiannya pada tahun 1984. Setelah itu, Jenderal Lansana Conte mengambil alih pemerintahan melalui kudeta dan mendirikan rezim otoriter. Lansana Conte, yang memerintah Guinea selama hampir satu dekade setelah menggantikan Sekou Toure, akhirnya memperkenankan partisipasi politik multipartai pada tahun 1993.

Namun, masa jabatannya ditandai oleh penurunan ekonomi dan ketidakstabilan, dengan seringnya terjadi protes dan pemberontakan oleh tentara. Pemilu tahun 1993, yang diharapkan akan membawa kemajuan menuju demokrasi yang lebih besar, berakhir dengan kekecewaan ketika Conte gagal memenuhi janjinya untuk memajukan dan menjamin hak asasi manusia bagi semua rakyatnya. Mirip dengan banyak rezim militer di Afrika, pemerintahan Conte melanggar prinsip-prinsip yang mereka klaim membawa mereka ke kekuasaan.

Meskipun gerakan pro-demokrasi kurang terorganisir dan koordinasi diantara partai-partai oposisi minim, media swasta memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dengan baik, memperkuat perlawanan terhadap rezim Conte. Contohnya adalah protes pada September 1990 oleh pelajar, pegawai negeri, dan guru untuk reformasi upah dan layanan pendidikan, yang dihentikan dengan kekerasan. Protes berlanjut dalam beberapa tahun berikutnya, termasuk pemogokan pada Mei 1991 dan pemilihan umum pada Desember 1993. Conte kembali terpilih di tengah tuduhan penipuan. Upaya Conte untuk membungkam kelompok pro-demokrasi dengan pengasingan tidak berhasil menghentikan protes yang terus-menerus. Pada tahun 2006, protes besar-besaran oleh buruh, pemuka agama, dan pedagang kecil memaksa Conte

untuk merombak kabinetnya. Namun, protes terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan Conte akhirnya memerintahkan militer untuk menekan demonstran, menyebabkan banyak korban jiwa dan penangkapan.

Pada saat situasi di Guinea memburuk dengan demonstrasi tanggal 22 Januari, Presiden Conté menentang campur tangan luar dalam urusan domestik. Dalam situasi ini, kunjungan Presiden Afrika Barat ditunda. Presiden Burkina Faso, Blaise Compaoré, yang baru saja menjabat sebagai presiden ECOWAS, melakukan konsultasi, sedangkan Presiden Nigeria, Obasanjo, mengusulkan untuk mengirim mantan Presiden Nigeria, Jenderal Ibrahim Babangida, dengan misi diplomatik ke Guinea. Pada tanggal 24 Januari, ECOWAS mengeluarkan siaran pers yang menyesalkan tingginya korban jiwa, terutama warga sipil, di Guinea dan meminta pemerintah Guinea untuk memastikan perdamaian dan keamanan, serta mempertahankan hak konstitusional, kebebasan berserikat, dan berekspresi. (Library, 2010)

Kematian Conte pada tahun 2008 membuka jalan bagi militer untuk kembali merebut kekuasaan politik, dengan Moussa Dadis Camara menjadi pemimpin berikutnya. Kelompok masyarakat sipil menuntut transisi cepat menuju demokrasi, tetapi Camara mengecewakan dengan lambatnya proses tersebut. Protes meluas, tetapi Camara mengakhiri mereka dengan kekerasan pada tahun 2009, menyebabkan ratusan korban tewas dan kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Conte memanipulasi pemilihan presiden hingga meninggal pada tahun 2008. Pada bulan Desember 2008, Kapten Moussa Dadis Camara memimpin kudeta militer dan mengambil alih kekuasaan. Namun, pemerintahannya terhenti setelah upaya pembunuhan terhadapnya pada Desember 2009. Camara mengalami penyalahgunaan kekuasaan dan mendapat tekanan dari protes yang terus-menerus, sehingga salah satu pengawalnya berusaha membunuhnya. Meskipun selamat dari percobaan pembunuhan itu dengan cedera, Camara harus dirawat di Maroko. Sekouba Konate, wakilnya yang berada di Lebanon pada saat itu, kembali ke Guinea untuk mengambil alih kepemimpinan dan menolak untuk memperbolehkan Camara yang terluka kembali sebagai kepala militer. Setelah Camara selesai mendapat perawatan medis di Maroko atas rekomendasi dari Perancis, dia tidak diizinkan kembali ke Guinea pada Januari 2010. Saat ini, Camara tinggal di pengasingan di Burkina Faso. (Library, 201)

Negara ini terakhir menggelar pemilihan presiden pada Oktober 2020, dimana Presiden Alpha Conde terpilih untuk masa jabatan ketiga yang kontroversial. Setelah pengambilalihan kekuasaan tersebut, pemerintah militer membentuk Dewan Nasional untuk Reunifikasi dan Pembangunan sebagai badan penguasa. Pada bulan yang sama, Dewan Nasional untuk Reunifikasi dan Pembangunan mengeluarkan Piagam Transisi untuk mengembalikan negara ke pemerintahan sipil, dan pada bulan Oktober 2021, Kolonel Doumbouya dilantik sebagai presiden sementara. Pemerintahan militer membubarkan parlemen pada September 2021, dan pada 22 Januari, digantikan oleh Dewan Transisi Nasional yang terdiri dari 81 anggota tanpa melalui proses pemilihan. Pada tanggal 21 Oktober, pemerintah Guinea dan organisasi regional untuk Afrika Barat, yaitu Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, sepakat untuk periode transisi selama 24 bulan yang meliputi pemilihan lokal, legislatif, dan presiden setelah konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pada tanggal 7 Desember, para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat mengumumkan kesepakatan dengan

pemerintah bahwa periode 24 bulan dimulai pada tanggal 4 Desember. (State Gov, 2022)

Tidak hanya Alpha Conde, presiden Guinea dari awal negara terbentuk sudah menciptakan pemerintahan yang otoriter. Pada tahun 1958, Guinea meraih kemerdekaan dari Perancis. Sekou Toure terpilih sebagai presiden pertama Guinea pasca-kemerdekaan, mendirikan rezim diktator yang berkuasa hingga kematiannya pada tahun 1984. Setelah itu, Jenderal Lansana Conte mengambil alih pemerintahan melalui kudeta dan mendirikan rezim otoriter.

Meskipun gerakan pro-demokrasi kurang terorganisir dan koordinasi diantara partai-partai oposisi minim, media swasta memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dengan baik, memperkuat perlawanan terhadap rezim Conte. Contohnya adalah protes pada September 1990 oleh pelajar, pegawai negeri, dan guru untuk reformasi upah dan layanan pendidikan, yang dihentikan dengan kekerasan. Protes berlanjut dalam beberapa tahun berikutnya, termasuk pemogokan pada Mei 1991 dan pemilihan umum pada Desember 1993. Conte kembali terpilih di tengah tuduhan penipuan.

Alpha Conde mengusulkan perubahan/referendum undang-undang. Menurutnya secara pribadi, referendum dilakukan demi menggantikan undang-undang tahun 2010 yang dirancang tidak terstruktur. Langkah yang diambil Alpha Conde ditentang oleh banyak pihak, antara lain: oposisi, militer, rakyat dan anggota majelis. Dikhawatirkan bahwa Alpha Conde mengambil kesempatan pribadi untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 kali dan mempertahankan kekuasaannya. Sebelum revisi konstitusi Guinea pada tahun 2010, presiden memiliki masa jabatan dua periode, masing-masing berlangsung selama lima tahun. Namun, setelah amendemen konstitusi Guinea pada tahun 2020, masa jabatan presiden diperpanjang menjadi dua periode, masing-masing selama enam tahun (Library, 2010).

Kondisi keamanan di Guinea setelah kudeta militer pada tahun 2021 sangat tidak stabil. Terjadinya intimidasi dan penangkapan terhadap oposisi dan juga warga sipil yang dilakukan oleh pasukan militer yang menggulingkan presiden Alpha Conde. Junta militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Dombouya mengumumkan pembubaran lembaga pemerintahan termasuk konstitusi dan penutupan akses masuk ke Guinea lewat jalur darat maupun udara. Kudeta di Guinea dipenuhi dengan kekerasan dan tuduhan pemalsuan serta kekurangan transparansi dalam proses pemilihan presiden tahun 2020. (Jaye, 2004)

Konflik di Guinea didominasi oleh faktor tidak demokratisnya negara korupsi, seperti: ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang buruk. Ketidakstabilan politik berbentuk kudeta militer menimbulkan berbagai dampak terhadap negara itu sendiri. Terdapat dampak dari terjadinya kudeta, yaitu: a) Kudeta yang pernah terjadi di suatu negara dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, karena anggapan bahwa tidak ada cara lain untuk mengambil alih pemerintahan selain kudeta b) Mempengaruhi sistem perpolitikan suatu negara c) Ketidakstabilan politik dan sanksi internasional berdampak negatif pada ekonomi Guinea. Investasi asing tertunda dan aktivitas ekonomi terganggu yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi negara yang sudah rentan d) Terdapat potensi peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan militer, termasuk pembatasan kebebasan sipil dan penindasan terhadap oposisi politik.

ECOWAS sebagai organisasi kawasan Afrika Barat memiliki peran bukan hanya dalam mengawasi stabilitas ekonomi negara anggota, namun juga dalam menjaga stabilitas keamanannya. ECOWAS yang juga memiliki peranan sebagai agen perdamaian sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil ketika negara anggotanya gagal untuk memberikan perlindungan yang memadai. Organisasi ini diakui secara global sebagai badan regional yang sukses, bersulang untuk integrasi dan kooperasi regional yang dapat diterapkan.

Sebelum terbentuknya ECOWAS, wilayah Afrika Barat terdiri dari sekelompok negara dengan sistem administrasi dan kolonial yang berbeda. Terdapat lima belas negara bagian dalam wilayah ini, yang menggunakan tiga bahasa asing resmi yang berbeda (Inggris, Perancis, dan Portugis). Keanekaragaman budaya, bahasa, dan ekologi di wilayah ini menciptakan peluang dan tantangan bagi proses integrasi. Upaya untuk menggabungkan kekuatan politik dan ekonomi selalu diakui sebagai langkah menuju penciptaan kesejahteraan bersama di kawasan ini (ECOWAS, 2022). Pada tahun 1945, pembentukan franc CFA menyatukan negara-negara berbahasa Perancis di wilayah ini menjadi satu kesatuan moneter yang menandai dimulainya upaya integrasi.

Pada tahun 1975, Perjanjian Lagos menjadi landasan pembentukan ECOWAS. Awalnya, ECOWAS dimulai dengan mempromosikan penciptaan adat istiadat dan serikat pekerja untuk memfasilitasi pergerakan bebas orang dan barang. Oleh karena itu, ini mencerminkan integrasi perdagangan dan sosial di antara negara-negara anggota yang menjadi landasan bagi berdirinya ECOWAS. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah kampanye peningkatan kesadaran telah diluncurkan bagi masyarakat dan pemerintah (Tsigbe; Kpaye, 2017). Perjanjian Lagos tahun 1975 awalnya bersifat murni ekonomis dan oleh karena itu tidak memuat komponen-komponen yang berkaitan dengan masalah perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pemerintahan. Namun, pada tahun 1993, Perjanjian ECOWAS direvisi untuk menyertakan perjanjian regional yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian, stabilitas, dan keamanan melalui promosi dan penguatan nilai-nilai keramah-tamahan.

Sejak kemerdekaan negara-negara anggotanya, wilayah ECOWAS telah mengalami ketidakstabilan. Sebagai respons terhadap ketidakstabilan ini, pada tahun 1978, mereka mengadopsi Protokol Non-Agresi, yang kemudian diperkaya dengan Protokol untuk bantuan timbal balik dalam pertahanan terhadap ancaman bersenjata atau agresi terhadap anggota negara pada tahun 1981. Untuk memenuhi tujuan ini, dibentuklah Komite dan Dewan Pertahanan serta Angkatan Bersenjata Sekutu dari Komunitas. Namun, ketegangan di kawasan Afrika Barat mengakibatkan pembentukan angkatan bersenjata multilateral pada tahun 1990 untuk menjaga perdamaian dan keamanan, yang dikenal sebagai *Economic Community of West African States Monitoring (ECOMOG)*. *ECOMOG* berasal dari koalisi negara-negara anggota berbahasa Inggris. *ECOMOG* melakukan intervensi di Liberia pada tahun 1990, Sierra Leone pada tahun 1997, dan Guinea-Bissau pada tahun 1999 (Uneca, 2010).

Pada bulan Desember 1999, ECOWAS mengadopsi Protokol Terkait Mekanisme Pencegahan Konflik, Penatalaksanaan, Penyelesaian, Pemeliharaan Perdamaian, dan Keamanan, yang merupakan protokol komprehensif terkait perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Protokol ini bertujuan untuk mengatasi pemeliharaan perdamaian, dukungan kemanusiaan, kemampuan membangun perdamaian, dan isu salib kejahatan perbatasan. Selain itu, negara-negara anggota ECOWAS juga mengadopsi Protokol Tambahan mengenai Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik pada tahun 2001 sebagai instrumen untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan

di Afrika Barat (Uneca, 2010). Sejak pendiriannya hingga saat ini, ECOWAS telah berkembang menjadi sebuah organisasi regional yang sah, yang muncul sebagai komunitas yang memiliki legitimasi, kekuatan ekonomi, dan kehadiran politik di Afrika Barat.

ECOWAS merancang dan melaksanakan strateginya untuk menghadapi tantangan perdamaian dan keamanan regional adalah dengan bekerja sama secara integrasi dengan Uni Afrika dan PBB. ECOWAS secara konsisten bekerjasama dengan Uni Afrika dan PBB, dan PBB sering menunjuk perwakilan khusus dari wilayah konflik untuk berinteraksi dengan ECOWAS. Saat ini, Uni Afrika telah menjadi mediator untuk berbagai konflik, termasuk di Pantai Gading, Liberia, dan Togo. Keunggulan dari ECOWAS sendiri terletak pada banyaknya pengetahuan yang luas tentang wilayah-wilayah yang berkonflik dan komitmen yang kuat dari banyak negara anggotanya terhadap keamanan regional menjadi dasar bagi pembangunan perdamaian yang terstruktur.

Program Kerja ECOWAS di Guinea

ECOWAS juga telah mengembangkan beberapa program kerja di Guinea sebelum tahun 2021 dengan melakukan

1. Pengembangan Infrastruktur:

ECOWAS telah mengembangkan beberapa proyek infrastruktur di Guinea, seperti pengembangan kilang aluminium oksida dan kilang bauksit. Guinea memiliki sekitar seperempat dari deposit bauksit dunia, dan ekstraksi intan, bijih besi, dan bijih emas meningkat, mengikuti investasi dalam infrastruktur kereta api melalui kesepakatan dengan Société Minière de Boké (SMB), sebuah konsorsium swasta perusahaan asing yang beroperasi di Guinea.

2. Pengembangan Sektor Pertambangan:

Guinea memiliki potensi besar dalam pertambangan, terutama bauksit, intan, bijih besi, dan bijih emas. ECOWAS telah mengembangkan beberapa proyek pertambangan di Guinea, seperti proyek bernilai miliaran dolar dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memanfaatkan cadangan bauksit baru dan mengembangkan kilang aluminium oksida.

3. Pengembangan Sektor Jasa:

Guinea telah mengembangkan beberapa proyek untuk meningkatkan kemajuan di sektor jasa. Contohnya, pemerintah telah menyetujui beberapa proyek untuk meningkatkan investasi di sektor jasa dan meningkatkan pendapatan negara.

Komunitas ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) telah berhasil mengatasi tantangan ini selama tahun-tahun terakhir, menunjukkan kemampuannya dalam mencegah konflik, mempromosikan perdamaian, dan menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Protokol yang terkait dengan Mekanisme Pencegahan Konflik, Pengelolaan, Resolusi, Pemeliharaan Perdamaian, dan Keamanan yang diadopsi pada tanggal 10 Desember. ECOWAS telah mencapai pencapaian yang signifikan dalam menjalankan mandatnya dengan mengurangi kekerasan konflik di wilayah tersebut dan melakukan langkah-langkah pencegahan konflik melalui berbagai inisiatif diplomasi, termasuk misi pencarian fakta, diplomasi tersembunyi, tekanan diplomatik, dan mediasi. (ECOWAS Conflict Prevention, 2008)

Adapun beberapa kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keamanan manusia di sub-wilayah tertentu, yang pertama yaitu persepsi

dan pemahaman negara anggota mengenai peran mereka dalam menyediakan keamanan manusia di sub-wilayah, masih terdapat kesulitan dalam mengubah peran negara-negara anggota dari penyedia keamanan menjadi fasilitator keamanan manusia terutama melalui penciptaan kondisi sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan yang aman. Kendala yang kedua terletak pada kesulitan mengkoordinasikan perilaku internal, etos, dan aturan keterlibatan nasional tentara yang terlibat dalam operasi keamanan internal. Upaya standar pertahanan bersama melalui reformasi sektor keamanan tampak lemah karena pengaruh kuat negara-negara bekas kolonial di seluruh sub-wilayah. Kendala selanjutnya adalah lambatnya respon atau berlanjutnya politisasi isu-isu kemanusiaan yang jelas sebagai masalah keamanan.

Saat awal pembentukannya, perjanjian ECOWAS tidak memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pemerintahan. Karena wilayah ECOWAS mengalami ketidakstabilan, negara-negara anggota mengadopsi Protokol Non-Agresi pada tahun 1978. Protokol tersebut kemudian diperkaya, dan pada bulan Mei 1981, negara-negara anggota ECOWAS menandatangani Protokol Pertahanan Saling Membantu untuk memberikan bantuan dalam pertahanan terhadap ancaman bersenjata atau agresi terhadap negara-negara anggota (Uneca, 2010). Untuk tujuan ini, ECOWAS membentuk Komite dan Dewan Pertahanan, serta Angkatan Bersenjata Sekutu Komunitas. Negara-negara anggota berkomitmen untuk tidak menyerang satu sama lain, tetapi akan memberikan bantuan dan dukungan jika terjadi konflik bersenjata di salah satu negara anggota. (Mural International, 2022)

Dengan meningkatnya ketegangan di wilayah Afrika Barat, pemeliharaan perdamaian regional, stabilitas, dan keamanan berdasarkan prinsip tetangga yang baik dimasukkan ke dalam Perjanjian Revisi ECOWAS pada tahun 1993 di dalam Pasal (4) sebagai salah satu prinsip dasar (Uneca, 2010). Selain itu, Protokol tahun 1999 juga difokuskan pada pemeliharaan perdamaian, dukungan kemanusiaan, kemampuan membangun perdamaian, serta masalah kejahatan lintas batas. Negara-negara anggota ECOWAS juga mengadopsi Protokol A/SP1/12/01 tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada tahun 2001 sebagai tambahan pada Protokol yang berkaitan dengan Mekanisme Pencegahan Konflik, Manajemen Konflik, Resolusi, Pemeliharaan Perdamaian, dan Keamanan di Afrika Barat.

Untuk membangun perdamaian dan keamanan di Afrika Barat, ECOWAS harus merevisi perjanjian resmi untuk memberikan dirinya lebih banyak kekuasaan dan otoritas atas negara-negara anggota. Sepanjang tahun 1990-an ada beberapa konflik antarnegara di Afrika Barat yang hanya mendapat sedikit perhatian dan tidak ada sama sekali keterlibatan komunitas internasional memaksa ECOWAS untuk mengerahkan pasukannya sendiri untuk mencegah penderitaan manusia lebih lanjut (Okere, 2015). ECOWAS, sejak tahun 1990, telah melakukan intervensi Liberia (dua kali), Mali, Sierra Leone, Pantai Gading, Guinea Bissau dan Gambia.

Alasan utama mengapa ECOWAS mengalami kesulitan dalam membangun dan mengelola institusi dengan baik adalah kurangnya sumber daya keuangan. Negara-negara di dalam ECOWAS mengalami kesulitan menopang perekonomian mereka sendiri; itulah sebabnya pajak dan bea masuk harus diturunkan, atau dihapus, agar proses integrasi dapat memberikan efek. Kurangnya pendapatan bagi komunitas menghambat keamanan finansial. Karena kurangnya industrialisasi di barat Afrika, negara-negara tersebut tidak mampu bersaing di pasar global, dan menurut PBB melaporkan bahwa 75% negara di Afrika Barat diklasifikasikan sebagai negara terkecil di dunia. Negara-negara bagian dalam ECOWAS juga mencakup 35% negara-negara

Afrika dalam daftar; Hal ini menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai wilayah termiskin di Afrika, namun juga di dunia. (Gupta, 2015). Peraturan yang diterapkan ECOWAS untuk mencapai tujuannya antara lain menghilangkan bea masuk antar negara anggota, menetapkan tarif umum dan memastikan “pergerakan bebas orang, jasa dan modal” (Perjanjian ECOWAS, 1975).

Misi dari komunitas ini adalah untuk memperkuat kerjasama dan integrasi regional dengan tujuan membentuk persatuan ekonomi di Afrika Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas ekonomi, memperkuat hubungan antara negara anggota dan berperan dalam perkembangan benua Afrika. (ECOWAS int, 2018)

Komunitas yang berkantor pusat di Abuja, Nigeria ini memiliki prinsip dasar

1. Kesetaraan dan saling ketergantungan Negara-negara Anggota;
2. Solidaritas dan kemandirian kolektif;
3. Kerja sama antar negara, harmonisasi kebijakan dan integrasi program;
4. Non-agresi antar Negara Anggota;
5. Tercapainya perdamaian, stabilitas dan keamanan regional melalui peningkatan dan penguatan hubungan bertetangga yang baik;
6. Penyelesaian perselisihan secara damai antar Negara Anggota, kerjasama aktif antara negara-negara tetangga dan promosi lingkungan yang damai sebagai prasyarat pembangunan ekonomi;
7. Pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat;
8. Akuntabilitas, keadilan ekonomi dan sosial serta partisipasi rakyat dalam pembangunan;
9. Pengakuan dan ketaatan terhadap aturan dan prinsip Komunitas;
10. Promosi dan konsolidasi sistem pemerintahan demokratis di setiap Negara Anggota seperti yang tertuang dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Politik yang diadopsi di Abuja pada tanggal 6 Juli 1991;
11. Distribusi biaya dan manfaat kerjasama dan integrasi ekonomi yang adil dan merata. (ECOWAS int., 2018)

Setelah meraih kemerdekaan Guinea, sebagian besar Guinea harus menghadapi tantangan yang besar dalam menangani warisan pemerintahan kolonial yang telah berlangsung bertahun-tahun, dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh Guinea. Secara individu, Guinea ini tidak mampu mengatasi tantangan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan regional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pembentukan ECOWAS menyediakan kerangka kerja regional untuk mencapai tujuan, proses integrasi ekonomi terganggu oleh ketergantungan yang kuat pada ekonomi negara-negara bekas koloni, yang cenderung lebih mengarah pada ketergantungan daripada kemandirian, serta rezim perdagangan internasional yang tidak merata yang tidak memberikan landasan bagi negara-negara Afrika untuk berkembang. (Thomas Jaye, 2011)

Respon ECOWAS Terhadap Kudeta di Guinea Tahun 2021

Guinea adalah anggota penting ECOWAS dan krisis politik yang penuh kekerasan selama lebih dari satu dekade telah memberinya peluang untuk memainkan peran

penting dalam masalah keamanan regional. Dalam konflik yang telah terjadi, ECOWAS turut memberikan tindakan dalam menanggapi konflik internal di Guinea.

1. Penangguhan Keanggotaan Guinea:
ECOWAS menangguhkan keanggotaan Guinea setelah kudeta militer pada 5 September 2021. Penangguhan ini sebagai tanggapan atas kudeta yang dilakukan oleh junta militer terhadap Presiden Alpha Condé.
2. Sanksi Terhadap Junta Militer:
ECOWAS memberlakukan sanksi terhadap junta militer di Guinea, termasuk pembekuan aset keuangan dan larangan perjalanan pada anggota junta. ECOWAS juga menuntut pembebasan Presiden Alpha Condé dan transisi singkat.
3. Memberi Larangan Perjalanan
ECOWAS memberlakukan larangan bepergian bagi anggota junta militer yang melancarkan kudeta di Guinea pada tahun 2021. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberikan tekanan pada junta, yang menandakan bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan mereka akan menghadapi konsekuensi.

Sanksi yang diberikan oleh ECOWAS setelah kudeta militer pada September 2021 memiliki beberapa dampak pada kehidupan sehari-hari warga Guinea yaitu;

A. Membekukan Aset Keuangan

Pembekuan aset keuangan juga berarti warga Guinea tidak dapat mengakses uang yang disimpan di luar negeri. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Guinea, terutama dalam hal penggunaan uang untuk keperluan sehari-hari seperti belanja, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan,

B. Membatasi Pengiriman Barang

Sanksi ECOWAS juga termasuk larangan perjalanan pada anggota junta Guinea dan kerabat mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Guinea, terutama dalam hal pengiriman barang dan jasa.

Respon ECOWAS merupakan langkah penting dan positif dalam upaya menangani konflik internal di Guinea, namun belum sepenuhnya cukup untuk menyelesaikan situasi yang kompleks ini. Dibutuhkan pendekatan yang lebih dan berkelanjutan, termasuk dukungan dari komunitas internasional, untuk memastikan bahwa Guinea kembali ke jalur demokrasi dan stabilitas jangka panjang.

ECOWAS memiliki komitmen untuk mendukung demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara anggotanya. Kudeta militer yang terjadi di Guinea merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Respon ECOWAS ini sebagai upaya untuk memulihkan pemerintahan sipil yang sah dan mencegah kudeta militer lainnya di kawasan tersebut. Alasan yang ketiga yaitu untuk menghindari dampak negatif; jika kudeta di Guinea dibiarkan tanpa konsekuensi, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi negara-negara lain di Afrika Barat, dimana militer atau kelompok lain mungkin merasa dapat mengambil alih kekuasaan tanpa menghadapi sanksi atau tekanan internasional. Respon tegas ECOWAS mengirimkan pesan bahwa pelanggaran terhadap tatanan konstitusional tidak akan diterima.

Adapun dampak dari respon ECOWAS terhadap konflik yang terjadi di Guinea yaitu penghukuman sanksi yang mana ECOWAS telah menghukum junta militer Guinea dengan sanksi termasuk pembekuan aset keuangan dan larangan dan perjalanan bagi anggota junta. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas kudeta militer yang menggulingkan Presiden Alpha Conde pada September 2021. Selain penghukuman

sanksi, pengaruh ekonomi juga menjadi dampak dari respon ECOWAS karena sanksi yang dilakukan oleh ECOWAS dapat mempengaruhi ekonomi Guinea secara signifikan. Pembekuan aset keuangan dan larangan perjalanan dapat menghambat aktivitas ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di negara tersebut.

Mandat ECOWAS dalam menjaga stabilitas regional mendorong keterlibatannya dalam kudeta di Guinea dengan harapan untuk mencegah konflik lebih lanjut yang dapat mengganggu stabilitas Afrika Barat. Berdasarkan teori organisasi internasional, ECOWAS adalah organisasi yang bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan di kawasan Afrika Barat. Konflik internal seperti kudeta di Guinea dianggap sebagai potensi ancaman yang dapat menyebar dan memicu ketidakstabilan di negara-negara tetangga, sehingga intervensi ECOWAS diperlukan untuk menjaga stabilitas regiona.

Kesimpulan

Konflik internal di Guinea pada tahun 2021, yang dipicu oleh kudeta militer terhadap Presiden Alpha Condé, mencerminkan masalah mendalam terkait tata kelola, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang otoriter, dan ketegangan etnis yang sudah lama ada. Meskipun kudeta tersebut diakui oleh sebagian masyarakat sebagai upaya untuk mengakhiri rezim yang dianggap korup dan represif, tindakan militer ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian politik yang serius. Respon dari komunitas internasional, terutama ECOWAS, menunjukkan komitmen untuk memulihkan ketertiban konstitusional dan mendorong transisi ke pemerintahan sipil.

Daftar Pustaka

- Abdalla, M. (2009). *Understanding natural resource conflict dynamics: The case of the Tuareg in North Africa and the Sahel*. Pretoria, South Africa: Institute for Security Studies.
- Adam, J. A., & Sanni, K. (2014). *The role of Economic Community of West African States (ECOWAS) in promoting borderless trade in West Africa*. *Bullion*, 34(4), 12–18.
- Badmus, A. I. (2009). *Managing arms in peace processes: ECOWAS and the West African civil conflict*. New York, NY: St. Martin's Press.
- Ceniguinee. (2015). *Ceni Recapitulatif General Election Presidentielle Resultat Rynthese* [daring]. Tersedia di https://web.archive.org/web/20151023070051/http://www.ceniguinee.org/attachments/article/137/ceni_recapitulatif_general_election_presidentielle_resultat_synthese.pdf.
- CNBC. (2021). *Elite Guinea Army Unit Say They Dissolved The Government and The Constitution of The West African Country* [daring]. Tersedia di <https://www.cnb.com/2021/09/05/elite-guinea-army-unit-said-it-has-toppled-long-time-president-alpha-conde.html>.
- ECOWAS. (2016). *Basic information* [daring]. Tersedia di <https://www.ecowas.int/about-ecowas/basic-information/>.
- _____. (2016). *Fundamental Principles* [daring]. Tersedia di <https://www.ecowas.int/about-ecowas/fundamental-principles/>.
- _____. (2016). *Member States* [daring]. Tersedia di <https://www.ecowas.int/member-states/>.

- _____, (2010). *Economy Community of West African States (ECOWAS) Revised Treaty* [daring]. Tersedia di <https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf>.
- Eric G. Berman and Katie E Sams. 2000. *Peacekeeping in Africa: Capabilities and Culpabilities, United Nations Institute for Disarmament Research. Geneva.*
- Europarl. (2021). *Political crisis in Guinea* [daring]. Tersedia di [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698020/EPRS_ATA\(2021\)698020_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698020/EPRS_ATA(2021)698020_EN.pdf).
- Fahrizal, M. (2021). *Peran Economic Community Of West African States (Ecowas) Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Gambia.* Tersedia di [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/03/Jurnal%20Muhammad%20Fahrizal'14%20\(03-01-21-08-42-30\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/03/Jurnal%20Muhammad%20Fahrizal'14%20(03-01-21-08-42-30).pdf).
- Fitriandi, Y. N. (2018). *Peran United Nations Of Cote D'ivoire (Unoci) Dalam Penyelesaian Konflik Pantai Gading.* Tersedia di [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/30.%201102045024%20-%20Yogi%20Nanda%20Fitriandi%20\(07-15-18-12-46-27\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/30.%201102045024%20-%20Yogi%20Nanda%20Fitriandi%20(07-15-18-12-46-27).pdf).
- Francis, D.J. (2009). *Peacekeeping in a bad neighbourhood: The Economic Community of West African States (ECOWAS) In Peace and Security in West Africa*
- Franceinfo. (2020). *Guinée : quatre choses à savoir sur le référendum constitutionnel reporté qui a plongé le pays dans une nouvelle impasse politique* [daring]. Tersedia di https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/guinee/guinee-quatre-choses-a-savoir-sur-le-referendum-constitutionnel-qui-a-plonge-le-pays-dans-une-nouvelle-impasse-politique_3846597.html.
- Mardiansyah, W. (2014). *Upaya Uni Eropa dalam Meredam Konflik di Wilayah Basque Country, Spanyol 2007 - 2013.* Tersedia di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28447/1/WHISNU%20MARDIANSYAH-FISIP.pdf>
- N'Diaye, B. (2014). *Conflicts and crises in West Africa: Internal and international dimensions. In ECOWAS and the dynamics of conflict and peace-building. Dakar, Senegal: CODESRIA.*